

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023**

**INSPEKTORAT  
KOTA PASURUAN**



**Inspektorat Kota Pasuruan**

Alamat : Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No.46, Petamanan, Kec. Panggungrejo, Kota

Pasuruan, Jawa Timur 67126

Nomor Telepon : (0343) 426603

Website : [inspektorat.pasuruankota.go.id](http://inspektorat.pasuruankota.go.id)

E-mail : [inspektorat.pasuruan@gmail.com](mailto:inspektorat.pasuruan@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Pasuruan merupakan wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan perencanaan strategik untuk mencapai tujuan, sasaran Inspektorat Kota Pasuruan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan yang diimplementasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pada instansi di lingkungan Inspektorat Kota Pasuruan. Selain itu, laporan ini memberi analisa akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pasuruan dengan menghubungkan indikator, target serta capaian kinerja dengan sasaran maupun kegiatan. Aspek keuangan juga menjelaskan sumber dana, realisasi dan kendala serta langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kendala tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Pasuruan tahun 2023 disusun dengan tujuan memberikan informasi atas capaian kerjanya, dan sebagai motivator bagi instansi di Lingkungan Inspektorat Kota Pasuruan untuk berbenah dan menjadi lebih baik.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sarana bagi Inspektorat Kota Pasuruan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan pengawasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2023 dan bahan penyempurnaan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pasuruan, Januari 2024  
Inspektur Kota Pasuruan



**Dra. EMA NURHAYATI**  
NIP. 19690206 199602 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kota Pasuruan sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan Kota Pasuruan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kota Pasuruan secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat Kota Pasuruan menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan.

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Daerah	Level Maturitas SPIP	Hasil QA Inspektorat Kota Pasuruan	Level 3	Level 3	100%

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I .....	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang .....	7
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	8
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	8
1.2.2 Anggaran.....	9
1.2.3 Isu Strategis.....	9
1.3 Dasar Hukum.....	10
1.4 Sistematika Laporan Kinerja .....	11
BAB II .....	13
PERENCANAAN KINERJA .....	13
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	13
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 Capaian Kinerja.....	26
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	26
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	26
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	27
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	29

3.1.5	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	30
3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	31
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	33
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. ....	34
3.2	Realisasi Anggaran .....	36
BAB IV	.....	38
PENUTUP	.....	38
LAMPIRAN	.....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	ii
Tabel 1.12 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2022) dan Tahun n (2023) .....	9
Tabel 2. 13 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	14
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023.....	14
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Kota Pasuruan .....	15
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023 .....	15
Tabel 2. 5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023.....	16
Tabel 2. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023.....	21
Tabel 2. 7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	21
Tabel 3. 14 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	26
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	26
Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja .....	27
Tabel 3. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	29
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	30
Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi .....	31
Tabel 3. 7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran .....	33
Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan .....	34
Tabel 3. 9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pasuruan .....	9
Gambar 2 Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	39
Gambar 3 Scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	40
Gambar 4 Matriks Renstra Inspektorat Kota Pasuruan 2021-2026 .....	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Kepala Daerah. Inspektorat sebagai salah satu satuan kerja penyelenggara pemerintahan daerah juga wajib mempertanggungjawabkan kepada stakeholder. Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kota Pasuruan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

LAKIP merupakan dasar untuk terselenggaranya "*Good Governance*". Adapun dasar-dasar terselenggaranya "*Good Governance*" yaitu TAP MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat menjadi umpan balik bagi instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lebih efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, serta masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang bekepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Daerah, Inspektorat Kota Pasuruan menyusun LAKIP Tahun 2022 sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan Inspektur Kota Pasuruan kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Pasuruan.

Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Indikator kinerja kegiatan mulai dari masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Diharapkan penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini mampu menggambarkan pencapaian pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 (1 Januari s/d 31 Desember 2023).

## **1.2 Penjelasan Umum Organisasi**

### **1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

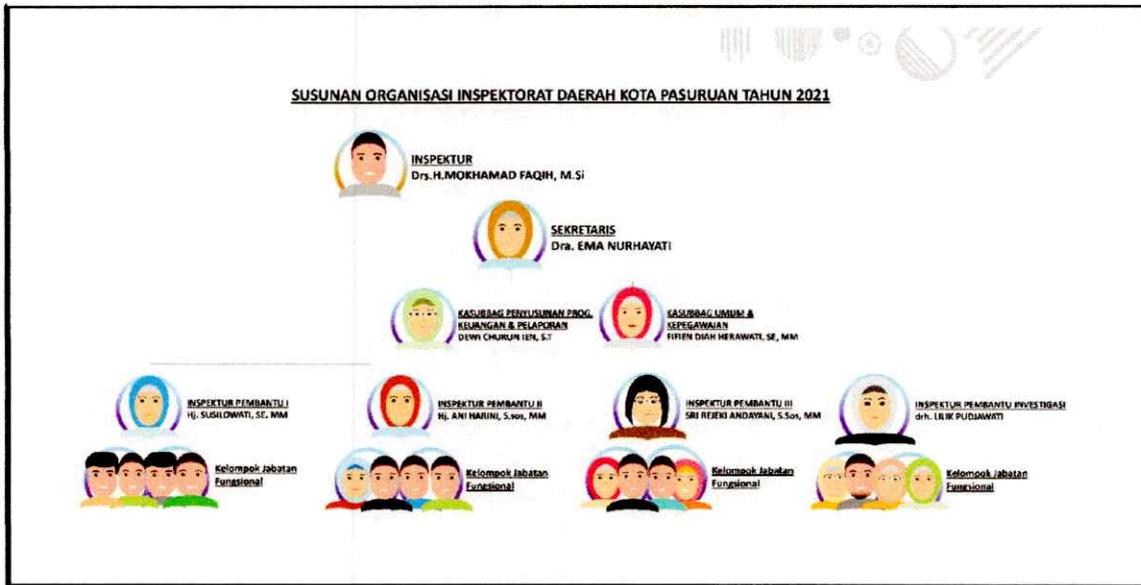
Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat Kota Pasuruan:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pasuruan



Sumber : Renstra Inspektorat Kota Pasuruan 2021-2026

### 1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2023:

Tabel 1.12 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2022) dan Tahun n (2023)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp 7.747.296.946
APBD	Tahun n	Rp 8.538.494.024
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp

Sumber : RKA Inspektorat Tahun 2023

### 1.2.3 Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis lembaga pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Pasuruan, dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT. Dalam hal ini dicari beberapa faktor pendukung dan penghambat dari intern maupun ekstern lembaga.

Hal lain yang dianggap penting adalah isu - isu strategis yang dihadapi dalam pengawasan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel diantaranya :

1. Belum sepenuhnya menerapkan perencanaan pengawasan berbasis risiko;

2. Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dilihat dari Opini Laporan Keuangan yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK-RI). Semakin baik opini yang diberikan BPK-RI menandakan kinerja suatu instansi semakin akuntabel. Selain itu predikat penilaian SAKIP sesuatu hal yang patut diperhitungkan dalam akuntabilitas kinerja, karena didalam SAKIP tersebut juga menggambarkan potensi dan realisasi keuangan serta pencapaian output dan outcome dari setiap OPD (Pemerintah Kota Pasuruan). Hal ini merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (public) sebagai *stakeholder*,
3. Terdapat kegiatan pengawasan yang dilakukan di luar PKPT yang telah ditetapkan sehingga mempengaruhi alokasi sumber daya aparatur dan waktu pengawasan;
4. Pemenuhan alokasi anggaran pengawasan belum memenuhi 1% dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Belum optimalnya kegiatan *expose* hasil pengawasan di internal Inspektorat untuk menetapkan standar pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan.
6. Dengan berkembangnya ilmu pengawasan dan permasalahan tata kelola pemerintahan, dibutuhkan peningkatan kompetensi APIP secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

### **1.3 Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pasuruan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

#### **1.4 Sistematika Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

###### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN**

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret daripada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Pasuruan adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu ***"Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik melalui Pengawasan yang Efektif"***.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai. Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam satu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Sasaran yang hendak dicapai Inspektorat adalah ***"Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Daerah"*** dan ***"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima"***.

Dapat dijelaskan Tujuan dan Sasaran beserta Indikator pada BAB IV Renstra Perangkat Daerah yang dituangkan pada tabel dibawa ini:

**Tabel 2. 13 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif	Meningkatnya efektifitas Pengawasan	Level Maturitas SPIP	2	3	3	3	3

Sumber : *Renstra Inspektorat Kota Pasuruan Periode 2021-2026*

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama (dijelaskan dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi rumus hitung) Inspektorat Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Daerah	1.1 Level Maturitas SPIP	Level	Berdasarkan LHPM (Laporan Hasil Penilaian Mandiri) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil QA Inspektorat Kota Pasuruan	LHPM Maturitas SPIP Terintegrasi

Sumber: *Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023*

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Dapat dijelaskan Tujuan dan Sasaran berserta Indikator selaras dengan Renja PD yang dituangkan pada tabel dibawa ini:

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif	Meningkatnya efektivitas pengawasan daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3

Sumber : Rencana Kerja Inspektorat Kota Pasuruan tahun 2023

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka disusunlah Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dalam perjanjian kinerja ini terdapat 3 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Daerah, Meningkatkan Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima (1) dan Meningkatkan Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima (2). Adapun Perjanjian Kinerja oleh Inspektur Inspektorat Kota Pasuruan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100
		Nilai SAKIP	70
		Persentase ketercapaian pelaksanaan	90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		program dukungan sasaran PD	
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif	Nilai persepsi korupsi	72
3	Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Level maturitas SPIP	3

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023*

#### Program

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pengawasan
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

#### Anggaran

Rp 8.246.427.636  
Rp 281.326.860  
Rp 538.598.420

Inspektorat Kota Pasuruan memiliki 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan di tahun 2023 untuk mendukung tugas dan fungsinya.

. Dapat dijelaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan DPA Perangkat Daerah yang dituangkan pada tabel dibawa ini:

Tabel 2. 5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 Dokumen

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	1 Laporan
5	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti	2 Even
6	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>90%</b>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penilaian angka kredit yang tersedia	2 Dokumen
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah ikhtisar hasil pengawasan yang tersusun	2 Laporan
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan
12	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</b>	<b>90%</b>
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	4 Dokumen
14	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya</b>	<b>90%</b>
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	1 Laporan
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pengawasan	25 Orang
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja PD	1 Kali
		Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani aparatur	12 Kali
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis substantive	25 Orang
		Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS	10 orang
19	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</b>	<b>90%</b>

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	8 Jenis
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1 Jenis
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	6 Jenis
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 Kali
25	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>90%</b>
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	7 Jenis
27	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</b>	<b>90%</b>
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	300 Lembar
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telepon dan air yang terbayarkan	12 Bulan
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	35 Jenis
		Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	16 Jenis
		Jumlah tenaga honorer perkantoran	9 Orang
31	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>90%</b>
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	20 Unit
		Jumlah pajak kendaraan yang terbayarkan	20 Unit
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	3 Jenis
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga keamanan dan tenaga kebersihan yang terbayar	5 orang

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Volume pemeliharaan sarana gedung kantor	300 m2
35	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rata – rata capaian nilai SAKIP OPD wilayah I / II / III	BB
36	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rata rata skor perencanaan, evaluasi dan capaian kinerja OPD wilayah I II III	75%
37	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan yang terlaksana	4 Kegiatan
38	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan	10 kali
39	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu dokumen laporan keuangan yang terlaksana	4 Kali
40	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu dokumen laporan keuangan yang terlaksana	1 Kali 41 PD
41	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kerjasama yang pengawasan yang dilaksanakan	3 kali
42	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah tindak lanjut temuan pengawasan	2 kali
43	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rata rata skor perencanaan, evaluasi dan capaian kinerja OPD wilayah I II III	75%
44	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen SAKIP PD yang dievaluasi	33 PD
		Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	6 kasus
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	1 kali
45	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Level 3
46	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rata-rata skor MRi dan SPI OPD Wilayah I II III	75%
47	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan evaluasi yang dilaksanakan	2 Kali
48	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1 Dokumen
49	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rata - rata skor MRI, SPI dan IEPK OPD Wilayah I II III	75%
50	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	2 Kali

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah kegiatan satgas SPIP yang terfasilitasi	1 kegiatan
		Jumlah pemeriksaan APEP yang terfasilitasi	2 Kali

Sumber : *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023*

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi	Rp 17.177.540
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.070.374.772
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 42.988.000
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 942.829.600
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 176.215.780
6 Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 195.582.700
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 274.195.350
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 512.546.434
9 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 301.475.700
10 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 31.371.160
11 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 83.113.400
12 Pendampingan dan Asistensi	Rp 455.485.020

\*Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pada Inspektorat Kota Pasuruan

Pada tanggal 02 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase ketercapaian pelaksanaan program dan dukungan sasaran PD	90	90
		Nilai SAKIP OPD	70	BB
2	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100	100
3	Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Level maturitas SPIP	3	3

Sumber : *Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023*

**Program**

**Anggaran**

	Sebelum	Sesudah
1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp 8.231.910.176	Rp 8.246.427.636
2. Program penyelenggaraan pengawasan	Rp 332.846.860	Rp 281.326.860
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Rp 538.598.420	Rp 435.112.820

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 Dokumen

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	1 Laporan
5	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti	2 Even
6	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>90%</b>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penilaian angka kredit yang tersedia	2 Dokumen
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah ikhtisar hasil pengawasan yang tersusun	2 Laporan
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan
12	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</b>	<b>90%</b>
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	4 Dokumen
14	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya</b>	<b>90%</b>
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun	1 Laporan
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pengawasan	25 Orang
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja PD	1 Kali
		Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani aparatur	12 Kali
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis substantive	25 Orang
		Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS	10 orang
19	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</b>	<b>90%</b>

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	8 Jenis
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1 Jenis
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	6 Jenis
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 Kali
25	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>90%</b>
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	7 Jenis
27	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</b>	<b>90%</b>
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	300 Lembar
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telepon dan air yang terbayarkan	12 Bulan
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	35 Jenis
		Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	16 Jenis
		Jumlah tenaga honorer perkantoran	9 Orang
31	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>90%</b>
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	20 Unit
		Jumlah pajak kendaraan yang terbayarkan	20 Unit
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	3 Jenis
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga keamanan dan tenaga kebersihan yang terbayar	5 orang

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Volume pemeliharaan sarana gedung kantor	300 m2
35	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Rata – rata capaian nilai SAKIP OPD wilayah I / II / III</b>	<b>BB</b>
36	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Rata rata skor perencanaan, evaluasi dan capaian kinerja OPD wilayah I II III</b>	<b>75%</b>
37	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan yang terlaksana	4 Kegiatan
38	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan	10 kali
39	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu dokumen laporan keuangan yang terlaksana	4 Kali
40	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu dokumen laporan keuangan yang terlaksana	1 Kali 41 PD
41	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kerjasama yang pengawasan yang dilaksanakan	3 kali
42	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah tindak lanjut temuan pengawasan	2 kali
43	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Rata rata skor perencanaan, evaluasi dan capaian kinerja OPD wilayah I II III</b>	<b>75%</b>
44	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen SAKIP PD yang dievaluasi	33 PD
		Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	6 kasus
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	1 kali
45	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III</b>	<b>Level 3</b>
46	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Rata-rata skor MRi dan SPI OPD Wilayah I II III</b>	<b>75%</b>
47	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan evaluasi yang dilaksanakan	2 Kali
48	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1 Dokumen
49	<b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Rata - rata skor MRI, SPI dan IEPK OPD Wilayah I II III</b>	<b>75%</b>
50	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	2 Kali

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah kegiatan satgas SPIP yang terfasilitasi	1 kegiatan
		Jumlah pemeriksaan APEP yang terfasilitasi	2 Kali

Sumber : *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023 (setelah perubahan)*

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi	Rp 17.177.540
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.089.820,332
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 34.588.000
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 862.337.600
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 250.878.780
6 Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 204.883.600
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 274.195.350
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 512.546.434
9 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 249.955.700
10 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 31.371.160
11 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 54.563.400
12 Pendampingan dan Asistensi	Rp 380.549.420

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja**

**3.1.1 Skala Capaian Kinerja**

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3. 14 Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

**3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan**

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pasuruan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Ketercapaian pelaksanaan program dan dukungan sasaran PD	90	92,13	127,78	Sangat tinggi	MONEV
		Nilai SAKIP OPD	BB	BB	102,29	Sedang	LHE SAKIP
2	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	100	100	100	Sangat tinggi	MONEV

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Level Maturitas SPIP	3	3	100	Sangat tinggi	LHPM Maturitas SPIP Terintegrasi

Sumber : **MONEV TA 2023 Inspektorat Kota Pasuruan**

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Ketercapaian pelaksanaan program dan dukungan sasaran PD telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 90% dengan realiasi **92,13%** dan capaian kinerja sebesar 127,78%. Masuk dalam kategori **sangat tinggi**.
2. Nilai SAKIP OPD telah mencapai target yang ditetapkan sebesar BB dengan realisasi nilai BB dan capaian kinerja sebesar 102,29%. Masuk dalam ketegori **sangat tinggi**.
3. Persentase temuan yang ditindak lanjuti telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi **100%** dan capaian kinerja 100%. Masuk dalam ketegori **sangat tinggi**. Dalam indikator temuan yang ditindak lanjuti adalah temuan internal Inspektorat Kota Pasuruan.
4. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pasuruan yang dilakukan pada tahun anggaran 2023 telah mencapai **Level 3**. Telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu Level 3 dan capaian kinerja sebesar 100%. Masuk dalam ketegori **sangat tinggi**.

### 3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam	Persentase Ketercapaian pelaksanaan	88%	82%	91,79%	90%	115%	127,78

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	menjamin pelayanan prima	program dan dukungan sasaran PD						
		Nilai SAKIP OPD	B	B	BB	BB	71,6%	102,29
2	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Level Maturitas SPIP	2	2	2	3	3	100

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP Terintegrasi

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase ketercapaian pelaksanaan program dan dukungan sasaran PD telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 90% dengan realisasi sebesar **115%**. Jika dilihat di dalam tabel untuk indikator ini kinerja Inspektorat Kota Pasuruan selalu menunjukkan progress yang meningkat dari taun 2021 sampai dengan tahun 2023.
2. Nilai SAKIP OPD telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu BB dengan realisasi **nilai BB**. Capaian kinerja sebesar 102,29%.
3. Persentase temuan yang ditindak lanjuti memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi **100%**. Dalam indikator temuan yang ditindak lanjuti adalah temuan internal Inspektorat Kota Pasuruan.
4. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pasuruan yang dilakukan pada tahun anggaran 2023 telah mencapai **Level 3**. Telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu Level 3 dan capaian kinerja sebesar 100%. Masuk dalam ketegori **sangat tinggi**.

**3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Nama Perangkat Daerah Nama Daerah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Ketercapaian pelaksanaan program dan dukungan sasaran PD	115%	-	-
		Nilai SAKIP OPD	BB	-	-
2	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	-	-
3	Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Level Maturitas SPIP	3	3	100

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP Terintegrasi dan Renstra Inspektorat 2021-2026

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase ketercapaian pelaksanaan program dan dukungan sasaran PD telah memenuhi target kinerja tahun 2023 yaitu **90%**. Untuk indikator ini tidak masuk ke dalam indikator kinerja di dalam renstra perubahan Inspektorat Kota Pasuruan 2021-2026.

2. Nilai SAKIP OPD telah memenuhi target kinerja yang tahun 2023 yaitu **nilai BB**. Untuk indikator ini tidak masuk ke dalam indikator kinerja di dalam renstra perubahan Inspektorat Kota Pasuruan 2021-2026.
3. Persentase temuan yang ditindak lanjuti memenuhi target kinerja tahun 2023 yaitu **100%**. Untuk indikator ini tidak masuk ke dalam indikator kinerja di dalam renstra perubahan Inspektorat Kota Pasuruan 2021-2026.
4. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pasuruan yang dilakukan pada tahun anggaran 2023 telah mencapai **Level 3** dan mencapai target Renstra Inspektorat Kota Pasuruan 2021-2026.

### 3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%

Sumber : <https://www.bpkp.go.id/spip/konten/4144/Hasil-Penilaian-SPIP.bpkp>

Uraian penjelasan tabel :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal **level 3**. Besaran level ini adalah nilai **standar nasional** yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai tolok

ukur untuk penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal mencapai level 3.

### 3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Ketercapaian pelaksanaan program dan dukungan sasaran PD	90%	115%	127,78	Target berhasil tercapai	Melaksanakan target kinerja sesuai prosedur dan SOP yang berlaku
		Nilai SAKIP OPD	BB	BB	102,29	Target berhasil tercapai	Melaksanakan target kinerja sesuai prosedur dan SOP yang berlaku
2	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100	Target berhasil tercapai	Melaksanakan target kinerja sesuai prosedur dan SOP yang berlaku
3	Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Level Maturitas SPIP	3	3	100	Target berhasil tercapai	Tetap melakukan pendampingan terhadap semua assessor SPIP OPD dilingkungan Pemerintah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Kota Pasuruan

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP Terintegrasi

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase ketercapaian pelaksanaan program dan dukungan sasaran PD telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 90% dengan realisasi sebesar **115%** dan capaian kinerja **127,78%**. Jika dilihat di dalam tabel untuk indikator ini kinerja Inspektorat Kota Pasuruan selalu menunjukkan progress yang meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
2. Nilai SAKIP OPD telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu BB dengan realisasi **nilai BB**. Capaian kinerja sebesar **102,29%**.
3. Persentase temuan yang ditindak lanjuti memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi **100%** dan capaian kinerja **100%**. Dalam indikator temuan yang ditindak lanjuti adalah temuan internal Inspektorat Kota Pasuruan.
4. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pasuruan yang dilakukan pada tahun anggaran 2023 telah mencapai **Level 3**. Telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu Level 3 dan capaian kinerja sebesar 100%. Masuk dalam kategori **sangat tinggi**.

### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	90%	115%	127,78	8.246.427.636	7.668.214.866	92,99	38,26
		BB	BB	102,29	10.000.000	9.807.600	98,08	1,96
2	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	100%	100%	100	1.032.160	1.025750	99,38	0,02
3	Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Level 3	Level 3	100	435.112.820	278.710.115	64,05	56,12

Sumber : **Monev Inspektorat Kota Pasuruan TA 2023**

Uraian penjelasan tabel:

1. Terdapat 2 (dua) indikator yaitu:
  - a. Persentase ketercapaian pelaksanaan program dan dukungan sasaran PD memiliki capaian kinerja 127,08% dan capaian anggaran 92,99% dengan efisiensi sebesar 38,26%.
  - b. Nilai SAKIP OPD memiliki capaian kinerja 102,29% dan capaian anggaran 98,08% dengan efisiensi sebesar 1,96%.
2. Persentase temuan yang ditindak lanjuti memiliki capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99,38% dengan efisiensi sebesar 0,02%.
3. Level maturitas SPIP memiliki capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 64,05% dengan efisiensi sebesar 56,12%.

### 3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase Ketercapaian pelaksanaan program dan dukungan sasaran PD	127,78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	127,78	Menunjang	Mencapai target kinerja
		Nilai SAKIP OPD	102,29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	127,78	Menunjang	Mencapai target kinerja
2	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	127,78	Menunjang	Mencapai target kinerja
3	Meningkatnya efektifitas pengawasan daerah	Level Maturitas SPIP	100	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD dengan peningkatan nilai evaluasi SAKIP	111,43	Menunjang	Mencapai target kinerja
				Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Rata-rata capaian level maturitas SPIP wilayah 1,2 dan 3	100	Menunjang	Mencapai target kinerja

Sumber : Monev Inspektorat Kota Pasuruan TA 2023

Uraian penjelasan tabel:

1. Persentase ketercapaian pelaksanaan program dan dukungan sasaran PD diampu oleh 1 (satu) program yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan capaian kinerja sebesar 127,78% dan mencakup kegiatan berikut:
  - a. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan capaian kinerja 83,33%.
  - b. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan capaian kinerja 111,11%.
  - c. Administrasi umum perangkat daerah dengan capaian kinerja 118,89%.
  - d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian kinerja 108,89%.
  - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian kinerja 130%.
  - f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian kinerja 111,11%.
2. Nilai SAKIP OPD diampu oleh 1 (satu) program yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan capaian kinerja sebesar 127,78% dan mencakup Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evalausi Kinerja Perangkat daerah dengan capaian kinerja 100%.
3. Persentase temuan yang ditindak lanjuti diampu oleh 1 (satu) program yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan capaian kinerja sebesar 127,78% dan mencakup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 113,33%.
4. Level maturitas SPIP diampu oleh 2 (dua) program, yaitu
  - a. **Program Penyelenggaraan Pengawasan** dengan capaian kinerja 111,43%.
  - b. **Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi** dengan capaian kinerja 100%.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Program penyelenggaraan pengawasan</b>	<b>281.326.860</b>	<b>270.592.875</b>	<b>96,18</b>
1.1	Penyelenggaraan pengawasan internal	249.955.700	241.485.650	96,61
1.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	28.172.100	27.093.300	96,17
1.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7.657.540	4.118.600	53,78
1.1.3	Reviu Laporan Kinerja	7.020.260	6.254.550	89,09
1.1.4	Reviu Laporan Keuangan	10.237.820	10.157.625	99,22
1.1.5	Kerjasama Pengawasan Internal	163.583.760	161.866.825	98,95
1.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	33.284.220	31.994.750	96,13
1.2	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	31.371.160	29.107.225	92,78
1.2.1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	31.371.160	29.107.225	92,78
<b>2</b>	<b>Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi</b>	<b>435.112.820</b>	<b>278.710.115</b>	<b>64,05</b>

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	54.563.400	52.429.200	96,09
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	48.068.500	47.191.200	98,17
2.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	6.494.900	5.238.000	80,65
2.2	Pendampingan dan asistensi	380.549.420	226.280.915	59,46
2.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	125.058.600	108.183.100	86,51
2.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43.170.600	42.724.115	98,97
2.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	212.320.220	75.373.700	35,50

Sumber : **Monev Inspektorat Kota Pasuruan TA 2023**

Uraian penjelasan tabel:

Pada tabel diatas merupakan rincian anggaran yang sudah diserap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai sasaran strategis Inspektorat Kota Pasuruan yaitu Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Daerah.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Pasuruan untuk membantu pemahaman pembaca dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Semoga LKjIP ini dapat memenuhi kebutuhan semua pihak terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2023.

Kota Pasuruan, .... Januari 2024  
Inspektur Kota Pasuruan

**Dra. EMA NURHAYATI**  
NIP. 19690206 199602 2 001

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023

**Gambar 2 Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023**

PERJANJIAN KINERJA ESELON II			
NAMA	: Dra. EMA NURHAYATI		
NIP	: 196902061996022001		
PANGKAT / GOL.	: PEMBINA TINGKAT I / IV-B		
JABATAN / KELAS JABATAN	: INSPEKTUR / 12		
PERANGKAT DAERAH	: INSPEKTORAT		
TAHUN	: 2023		

NO	URAIAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai PMPRB	70
1.	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	- Persentase temuan yang ditindaklanjuti - Nilai SAKIP OPD - Persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100 70 90
	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif	Nilai Persepsi Korupsi	72
2.	Meningkatnya efektivitas pengawasan daerah	Level Maturnas SPIP	3

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp 8.231.910.176,00	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 332.846.860,00	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 538.596.420,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 9.103.355.456,00</b>	

Mengetahui,  
Dejabat Abusan Langsung  
WALI KOTA



SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 15 Maret 2023



Dra. EMA NURHAYATI  
NIP. 196902061996022001

**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun n (Jika Ada)**

**Gambar 3 Scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
ESELON II**

NAMA : DRA. EMA NURHAYATI  
 NIP : 196902061996022001  
 PANGKAT / GOL : PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C  
 JABATAN / KELAS JABATAN : INSPEKTUR / 14  
 PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT  
 TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD Nilai SAKIP PD	90 BB	90 BB
2	Meningkatnya Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100	100
3	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Daerah	Level Maturitas SPP	3	3

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp. 8.231.910.176,00	Rp. 8.246.427.636,00	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 332.846.860,00	Rp. 281.326.860,00	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 538.598.429,00	Rp. 380.549.420,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 9.103.355.456,00</b>	<b>Rp. 8.902.867.316,00</b>	

Pasuruan, 02 Oktober 2023

Mengetahui,  
 Pejabat Atasan Langsung  
 WALI KOTA

  
 SAIFULLAH YUSUF

INSPEKTUR

  
 DRA. EMA NURHAYATI  
 NIP. 196902061996022001

### Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Gambar 4 Matriks Renstra Inspektorat Kota Pasuruan 2021-2026

Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Pasuruan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif	Level maturitas SPIP	Meningkatnya efektivitas pengawasan daerah	Level OPD dengan peningkatan level maturitas SPIP	2	3	3	3	3	3